



PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 yang tidak dapat diselesaikan, dan yang tidak tertuang dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4310);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 80).
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 32)

Memperhatikan :

1. Rapat Bapemperda tanggal 22 September 2020
2. Surat Bupati Nomor 188.342/085/BUP tanggal 24 Maret 2020 tentang Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah
3. Surat Bupati Luwu Timur Nomor 188.342/0252/Bup tanggal 29 September 2020 tentang Penyampaian

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020.

Diktum I

Mengubah Lampiran dalam Keputusan DPRD Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini;

Diktum II

Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 1 Oktober 2020

KETUA DPRD,

LAMRAN SYAM

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020**

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10
1	Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum	Penambahan Nilai Penyertaan Modal	-	√	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	-	√	1. Bapelitbangda 2. PU & PR 3. Satuan Pol-PP & Damkar 4. PDAM	Triwulan I 2020	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)
2	Peraturan Daerah	Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD Kab. Luwu Timur TA. 2019	-	√	-	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan	√	-	Semua SKPD	Triwulan I 2020	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)

						Permendagri Nomor 21 Tahun 2011					
3	Peraturan Daerah	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Luwu Timur TA.2020	-	√	-	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011	-	√	Semua SKPD	Triwulan III 2020	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)
4	Peraturan Daerah	Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat	Pengaturan pembentukan hukum adat mengenai masyarakat	√	-	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak	√	-	1. Sekretariat Daerah 2. DPMD 3. Disparbudmudora 4. Bapelitbangda 5. Kesbangpol 6. DPKPP 7. Satuan Pol-PP & Damkar	Triwulan IV 2020	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
5	Peraturan Daerah	Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Luwu Timur	Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Luwu Timur	√	-	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan	√	-	1. Disparbudmudora 2. Satuan Pol-PP & Damkar	Triwulan IV 2020	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda)
6	Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Peninjauan atas Besaran Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	-	√	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-	√	1. DPKPP 2. Satuan Pol-PP & Damkar 3. Kecamatan	Triwulan IV 2020	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)

7	Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2015 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	<ol style="list-style-type: none"> Memasukkan 5 (lima) pelabuhan sebagai objek dan subjek retribusi yakni : <ul style="list-style-type: none"> Pelabuhan Matano Pelabuhan Bantilang Pelabuhan Loeha Pelabuhan Laut Lampia Perubahan atas struktur tariff yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan Penyesuaian tariff retribusi pelayanan kepelabuhanan yang tidak sesuai dan memberatkan masyarakat 	-	√	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-	√	<ol style="list-style-type: none"> BPKD Satuan Pol-PP & Damkar Bagian Hukum Camat Towuti Camat Nuha Camat Malili Kantor UPP Kelas III Malili 	Triwulan IV 2020	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Dinas Dinas Perhubungan (Dishub)
8	Peraturan Daerah	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Barat Cabang Malili	Penambahan Nilai Penyertaan Modal	√	-					Triwulan IV 2020	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)
9	Peraturan Daerah	Perlindungan Terhadap Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> Banyaknya Kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi, sehingga membutuhkan perhatian khusus dari semua pihak. Kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat. 	√	-	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 	√	-	<ol style="list-style-type: none"> DISDIK DINKES DPMD DP2KB DISDUKCAPIL Pol-PP & Damkar 	Triwulan IV 2020	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOS & P3A)

10	Peraturan Daerah	Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019								Triwulan IV 2020	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Dinas Kesehatan
11	Peraturan Daerah	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2021	-	√	-	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011	-	-	Semua SKPD	Triwulan IV 2020	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)

KETUA DPRD

DAMBAN SYAM